

SKRIPSI

**PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASCA
TSUNAMI ACEH TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2018)**



Disusun Oleh :

**CUKRI RAMADHAN
NIM. 140602198**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020M / 1441H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Cukri Ramadhan

NIM : 140602198

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 1 Januari 2020
Yang Menyatakan


Cukri Ramadhan
NIM. 140602198

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pasca Tsunami Aceh
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam
(Studi Kasus Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 - 2018)**

Disusun Oleh:

Cukri Ramadhan
NIM. 140602198

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Yasin Yusuf, MA

Wahyu Mulyani Benti Saidan, M.Econ

NIP: 19750405 200112 1 003

AR-RANIRY

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

SKRIPSI

Cukri Ramadhan
NIM. 140602198

Dengan Judul:

**Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pasca Tsunami Aceh Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 - 2018)**

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020
19 Jumadil Awal 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,


Dr. Muhammad Nasir Yusuf, MA
NIP. 19750403 200112 1 003

Sekretaris,


Wahyu Mulyani Benti Saidan, M.Econ

Penguji I,


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 196703 1 031

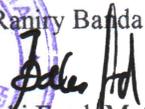
Penguji II,


Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196401419 2031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Cukri Ramadhan
NIM : 140602198
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : cukri1995@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pasca Tsunami Aceh Terhadap
Pertumbuhan ekonomi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 - 2018)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 14 Januari 2020

Mengetahui,

Penulis

Cukri Ramadhan
NIM. 140602198

Pembimbing I

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP: 19750405200112 1003

Pembimbing II

Wahyu Mulyani Benti Saidan, M.Econ

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Waktu yang hilang tak akan pernah kembali lagi.”

(Penulis)

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)." - (H.R. Muslim)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT kupersembahkan karya kecil dan sederhana ini untuk :
Ayahanda dan Ibunda tercinta yang jasanya tak akan pernah dapat terbalaskan sepanjang masa serta kepada kakakku tersayang yang telah menjadi mentari dikala diri ini berada dalam kelamnya kegelapan. Tak lupa pula kepada sahabat-sahabat terkasih yang telah senantiasa menemani dikala senang maupun dikala susah.

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pasca Tsunami Aceh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 – 2018)”*. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

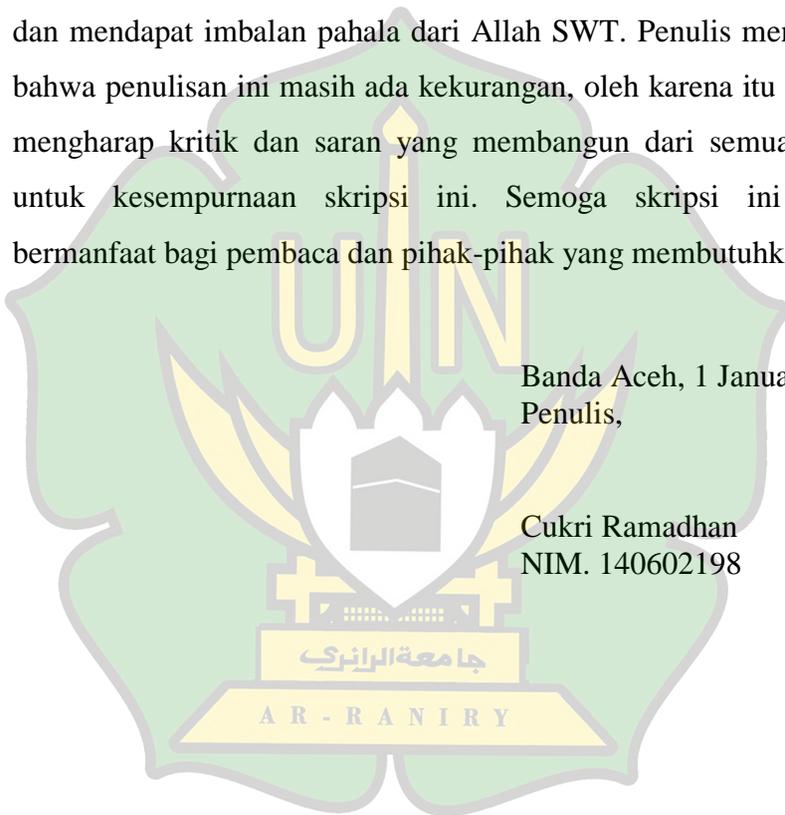
4. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA dan Wahyu Mulyani Benti Saidan, M.Econ selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar, memberi arahan serta motivasi terkait dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA dan Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku dosen penasehat akademik dan seluruh dosen akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muhammad K dan ibunda Ruhamah yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, motivasi tentang begitu berartinya kerja keras tanpa kenal rasa keluh kesah serta doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Serta Kak Sutri tersayang yang selalu memberikan semangat.
8. Ir. Busra Thamrin, MM selaku sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar yang telah memberikan data terkait penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Mirza Frananda Kusuma, Desy Ufiyanti, Putri Amalia dan teman-teman jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan

penyemangat agar penulis bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi. All the best for you guys!

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 1 Januari 2020
Penulis,

Cukri Ramadhan
NIM. 140602198



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	”
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> Atau <i>ya</i>	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū

Contoh :

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah</i>
طَلْحَةَ	: <i>Talḥah</i>

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ;Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Cukri Ramadhan
NIM : 140602198
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pasca Tsunami Aceh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 - 2018)
Tanggal Sidang : 14 Januari 2020
Tebal Skripsi : 95 halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Pembimbing II : Wahyu Mulyani Benti Saidan, M.Econ

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur pasca tsunami Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi ditinjau menurut ekonomi Islam di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2018. Sumber data yang diperoleh menggunakan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur lainnya yang mendukung penelitian ini.. Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif yaitu bertujuan untuk menguji teori tertentu yang sudah ada dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel dalam penelitian kuantitatif ini diukur menggunakan suatu instrumen penelitian yang kemudian data hasil penelitian dianalisis sesuai dengan prosedur-prosedur statistik dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian berdasarkan regresi linear sederhana menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikan (Sig.) 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh positif pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, yang menjadi tolok ukur dalam pembangunan ekonomi bukan hanya dari segi material tetapi yang dilihat dan yang menjadi titik tekan adalah keadilan untuk kemaslahatan serta prosesnya.

Kata kunci : Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

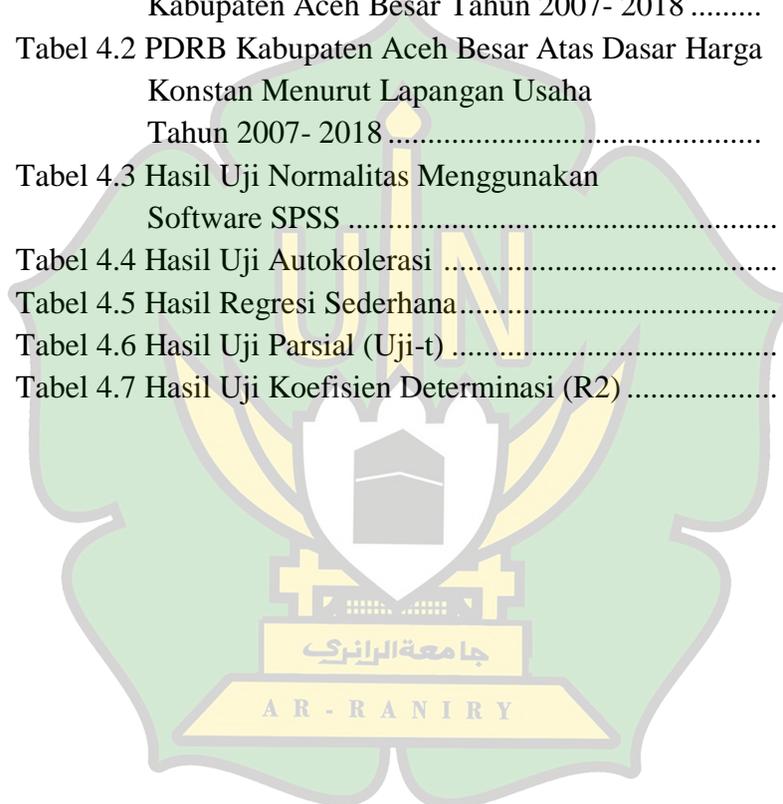
	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Pengertian Infrastruktur.....	12
2.1.1 Pendekatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	17
2.1.2 Pembangunan Infrastruktur Untuk Pengembangan Wilayah	18
2.1.3 Konseptualisasi Pera Infrastruktur.....	19
2.1.4 Pengaruh Infrastruktur Keterkaitan Timbal Balik Antara Infrastruktur Dan Ekonomi	20
2.2 Pengaruh dampak Bencana Alam terhadap pertumbuhan Ekonomi	21
2.2.1 Kategori Dampak Bencana	21

2.3	Definisi Perkembangan Ekonomi.....	24
2.4	Perbedaan Antara Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.....	25
2.4.1	Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	25
2.4.2	Indikator Pertumbuhan Ekonomi.....	27
2.4.3	Pembangunan Ekonomi	29
2.4.4	Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	33
2.4.5	Aliran Klasik.....	34
2.5	Model dan Strategi Ekonomi Wilayah	37
2.6	Model Pembangunan Ekonomi Wilayah.....	40
2.6.1	Model Pembangunan I.....	41
2.6.2	Model Pembangunan II.....	42
2.6.3	Model Pembangunan III	42
2.6.4	Model Pembangunan IV	43
2.7	Strategi Pembangunan Ekonomi Wilayah.....	43
2.7.1	Strategi Pembangunan Prasarana.....	44
2.8	Konsep Pertumbuhan Ekonomi.....	44
2.9	Penelitian Terdahulu	46
2.10	Kerangka Pemikiran.....	49
2.11	Hipotesis Penelitian	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		52
3.1	Jenis Penelitian Penelitian	52
3.2	Data dan Teknik Perolehannya.....	52
3.3	Lokasi dan Objek Penelitian	53
3.4	Teknik Pengumpulan Data	53
3.5	Variabel Penelitian	54
3.6	Uji Asumsi Klasik	54
3.6.1	Uji Normalitas.....	55
3.6.2	Uji Heterokedastisitas	55
3.6.3	Uji Autokorelasi.....	55
3.7	Teknik Analisis	56
3.7.1	Regresi Linier Sederhana.....	56
3.7.2	Uji Parsial (Uji t).....	57
3.7.3	Koefisie Determinasi (R ²).....	37
3.8	Definisi Operasional Variabel.....	58
3.9	Pengujian Hipotesis.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar	59
4.1.1 Sejarah Kabupaten Aceh Besar.....	59
4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Besar	61
4.1.3 Letak Geografis Kabupaten Aceh Besar	61
4.1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar ...	62
4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian	64
4.2.1 Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur Aceh Besar.....	64
4.2.2 Gambaran Umum Pertumbuhan Ekonomi Aceh Besar.....	66
4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	69
4.3.1 Uji Normalitas.....	69
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas	71
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	72
4.4 Analisis Linear Sederhana.....	73
4.5 Pengujian Hipotesis.....	75
4.5.1 Uji Parsial (Uji t).....	75
4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2).....	76
4.6 Pembahasan.....	77
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87

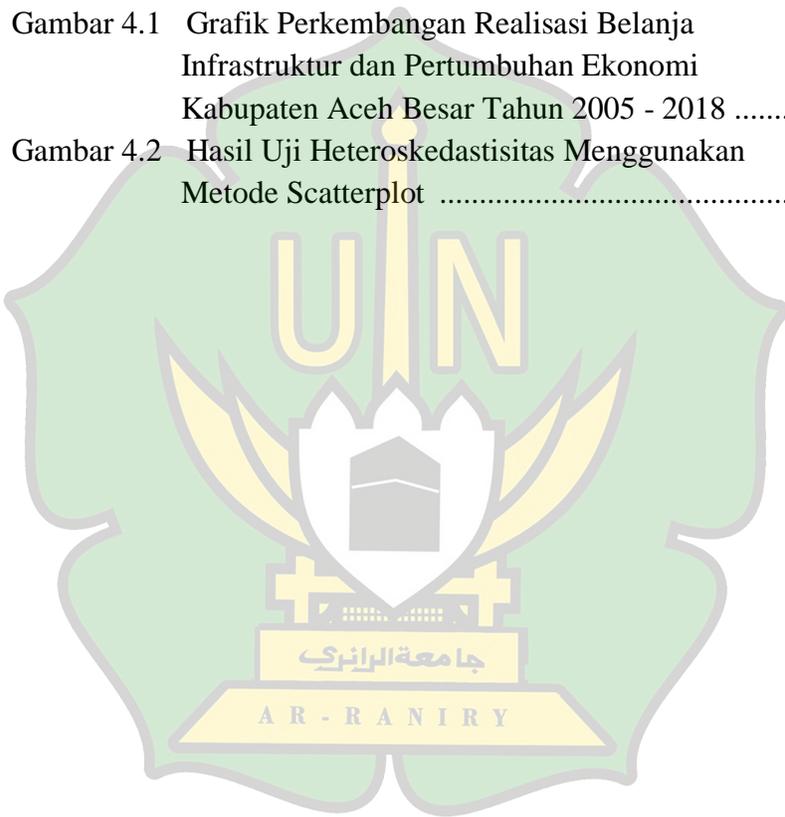
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	46
Tabel 4.1 Perkembangan Realisasi Belanja Infrastruktur Kabupaten Aceh Besar Tahun 2007- 2018	64
Tabel 4.2 PDRB Kabupaten Aceh Besar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007- 2018	68
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Software SPSS	70
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokolerasi	72
Tabel 4.5 Hasil Regresi Sederhana.....	74
Tabel 4.6 Hasil Uji Parsial (Uji-t)	76
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	77



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	50
Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 - 2018	69
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Metode Scatterplot	71



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Awal	87
Lampiran 2 Tabel Titik Persentase distribusi t (df =1-40) ...	88
Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik.....	89
Lampiran 4 Hasil Regresi Linear Sederhana	91
Lampiran 5 Uji Hipotesis	91
Lampiran 6 SK Pembimbing Skripsi	93
Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya (Haris, 2002).

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi *marginal productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi yaitu

keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruh terhadap pasar tenaga kerja.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung-gedung dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem infrastruktur dapat dikatakan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan agar berfungsi sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Perkembangan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan satu sama lain. Perbaikan infrastruktur pada umumnya dapat meningkatkan mobilitas penduduk, mempercepat laju pengangkutan barang, memperbaiki kualitas dari jasa pengangkutan tersebut, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pembangunan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana pembangunan. Perbaikan infrastruktur akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini serta banyaknya investasi yang masuk akan menyerap tenaga kerja. Infrastruktur yang baik juga akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakat, karena aktifitas ekonomi yang semakin

meningkat sebagai akibat mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan yang semakin tinggi.

Perkembangan realisasi belanja infrastruktur Kabupaten Aceh Besar pasca bencana alam gempa dan tsunami Aceh pada tahun 2004 dalam kurun waktu tahun 2005 hingga 2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun berfluktuasi pada tahun-tahun tertentu. Pembangunan infrastruktur menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan air bersih yang meliputi perbaikan serta pembangunan infrastruktur baru. Banyaknya alokasi belanja yang dilontarkan pemerintah maka akan menuntaskan prioritas penting dalam pembangunan infrastuktur yang berintegrasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ketika tidak ada pembangunan infrastruktur maka dinilai akan terjadi krisis ekonomi yang luar biasa, dengan demikian Pemerintah diharapkan agar terus berinovasi tentang pembangunan infrastruktur, mulai dari gagasan, perencanaan, studinya, pelaksanaan, manajemen kontruksinya sampai dengan perawatan. Setiap daerah pasti memiliki pendapatan sendiri yang biasanya berasal dari berbagai kegiatan perekonomian didalamnya yang disebut sebagai indikator perekonomian, dilevel Kabupaten maka disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena perannya sebagai salah satu indikator utama dalam perekonomian, hal tersebut membuat PDRB ini secara otomatis memegang peranan penting. Maka dari itu perlu dipahami

dengan baik agar perkembangan ekonomi yang terjadi di daerah dapat terpantau dengan baik oleh Pemerintah.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian. Di Kabupaten Aceh Besar, pembangunan daerah yang merupakan akibat dari dampak bencana alam gempa dan tsunami dapat dilihat dari perkembangan gampong-gampong seperti Gampong Meunasah Mon Cut dan Mon Ikeun yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang baik terhadap perekonomian warga.

Pada akhirnya perbaikan infrastruktur ini akan meningkatkan kondisi pembangunan Kabupaten Aceh Besar. Meningkatnya kondisi pembangunan akan memberikan efek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu perlu dilakukan suatu kajian tentang dampak pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian di Kabupaten Aceh Besar terutama di wilayah yang terkena dampak dari bencana alam gempa dan

tsunami. Sehingga diharapkan mampu memberikan solusi yang baik bagi penentuan kebijakan pembangunan infrastruktur ke depan.

Aceh yang identik dengan daerah Syariat Islam tentunya menggambarkan wilayah yang menerapkan hukum dan aturan syariah di berbagai aspek kehidupan tak terkecuali pada pembangunan infrastruktur serta pembangunan ekonomi. Begitu halnya konsep keadilan, mengikut falsafah pembangunan konvensional keadilan lebih berdasarkan pada nilai-nilai materialisme secara kuantitas. Sedangkan Islam melihat keadilan apabila manusia dapat mempertahankan rahmat kepada sekalian alam tanpa durhaka kepada Allah SWT maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan merata oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

Dilihat dari potensi yang ada di Kabupaten Aceh Besar maka dipandang perlu untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang bisa menjamin dan meningkatkan perkembangan ekonomi wilayah, pembangunan infrastruktur salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi daerah, dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur maka diduga akan ada perkembangan ekonomi di wilayah tersebut, melihat dari realita yang ada di Kabupaten Aceh Besar khususnya wilayah yang terkena dampak gempa dan tsunami terus terbenah dari segi infrastruktur pasca Tsunami Aceh, baik dalam pembangunan jalan, gedung-gedung, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang gunanya untuk

peningkatan pendapatan daerah dan juga perkembangan ekonomi di daerah.

Ada perbedaan dalam menilai pertumbuhan ekonomi antara konsep Islam dengan konsep kapitalis. Perbedaan tersebut dilihat dari sudut pandang yang berbeda tentang makna dan tujuan hidup. Ditinjau dari konsep dasar kapitalis yang tujuan utamanya adalah pemenuhan materi tanpa batas, maka mucullah sikap pemenuhan terhadap barang-barang dan jasa tanpa batas pula. Lain halnya dengan Islam, walaupun memandang perlu materi, akan tetapi Islam tidak melupakan unsur moral-spiritual dan tidak meletakkan materi sebagai tujuan utama, karena dalam ajaran Islam manusia tidak hanya akan menjalani hidup di dunia saja akan tetapi manusia akan dibangkitkan kembali kelak di akhirat. Sikap demikian sejak pertama sudah terintegrasi dalam kehidupan baik sosial, politik, atau ekonomi (Manan, 1997).

Tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam menurut Yusuf untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*al-hayat at-taiyibah*) sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An- Nahl [16] : 97).

Mayoritas penulis tentang ekonomi Islam memahami konsep pembangunan ekonomi dari beberapa ayat Al-Qur'an seperti ayat berikut :

﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَىٰ إِلَهِكُمْ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝۶۱﴾

Artinya : Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)" (Q.S. Hud [11]:61).

Ayat ini mengandung dua makna yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertama makna *al-wajib* atau kewajiban umat manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan. Kedua, ayat tersebut mengandung perintah Tuhan kepada umat manusia untuk membangun jagad raya. Perintah Allah tersebut bersifat wajib dan mutlak. Mayoritas penulis berpendapat kata *al-imarah* (memakmurkan) identik dengan kata *at-tanmiyah al-iqtisadiyah* (pembangunan ekonomi).

Ayat lain tentang pembangunan ekonomi adalah firman Allah:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝۱۵﴾

Artinya : Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah

sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan(Q.S. Al Mulq [67] : 15).

Ayat ini mengandung makna wujub al-infaq (kewajiban mengeluarkan biaya) dan membangun fasilitas yang mendukung keberhasilan kewajiban tersebut. Hukum membangun fasilitas yang mendukung realisasi terhadap perintah yang bersifat wajib adalah wajib pula. Didalam kaidah fiqihyah disebutkan : “*ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun*”. Dengan demikian, bekerja (*al-kasbu*) adalah suatu kewajiban alami dan *al-kasbu* menurut sebagian penulis adalah nama lain dari *al-intaj* (produksi). Dari sini kemudian para penulis muslim memahami adanya konsep pembangunan ekonomi didalam ajaran syariah.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pasca Tsunami Aceh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2018)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembangunan infrastruktur pasca Tsunami Aceh terhadap

pertumbuhan ekonomi ditinjau dari Ekonomi Islam di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pasca Tsunami Aceh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ditinjau Menurut Ekonomi Islam di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian selain menjawab permasalahan yang ada, penulis berharap penelitian ini dapat berguna dikemudian hari. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Aceh sebagai pengambil keputusan, terutama untuk menentukan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien dalam pembangunan infrastruktur agar perekonomian Aceh Besar menjadi lebih baik.
2. Bagi para akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian lainnya.
3. Bagi masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan dapat menyuguhkan suatu pengetahuan umum yang menarik, dan dipetik manfaatnya. Terutama pengetahuan terhadap

perkembangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi serta keuangan syariah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Susunan sistematika pembahasan dalam penulisan tentang pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pasca Tsunami Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi ditinjau menurut Ekonomi Islam di Kabupaten Aceh Besar dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum Kabupaten Aceh Besar, gambaran umum objek penelitian dan hasil

analisis pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Aceh Besar.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian, dan saran-saran untuk pihak yang bersangkutan maupun pihak lain yang berkepentingan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur adalah merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah. Keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan, sehingga pada tahap awal pembangunan disuatu negara hal tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh Pemerintah, yaitu dari APBN murni (Amrullah, 2003).

Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya yang merupakan *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur

merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional (Bappenas, 2003).

Ada dua kendala utama dalam pengadaan infrastruktur. Yang pertama adalah adanya kemungkinan terjadinya kegagalan pasar (*market failure*), dan yang kedua adalah menyangkut aspek pembiayaan. Dalam pengadaan infrastruktur dibutuhkan dana investasi yang besar dan pengadaan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang. Kegagalan pasar terjadi, karena beberapa jenis infrastruktur memiliki manfaat yang tidak hanya dapat dinikmati atau dirasakan secara pribadi akan tetapi juga dapat dirasakan orang lain. Dengan adanya kendala tersebut, maka pengadaan infrastruktur dilaksanakan oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah dengan dana yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pengeluaran pembangunan (Yanuar, 2006).

Infrastruktur dapat digolongkan sebagai modal atau kapital. Infrastruktur tergolong sebagai *social overhead capital*, berbeda dengan modal yang berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan produksi, perluasan infrastruktur tidak hanya menambah stok dari modal tetapi juga sekaligus meningkatkan produktivitas perekonomian dan taraf hidup masyarakat luas.

Teori Wagner menyebutkan adanya keterkaitan positif antara pertumbuhan ekonomi dan besarnya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Teori ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan tumbuh lebih cepat dari GDP, dengan

kata lain elastisitas pengeluaran pemerintah terhadap GDP lebih besar dari satu. Dalam, suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Dasar dari teori Wagner ini adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju. Pengeluaran pemerintah akan meningkat guna membiayai tuntutan masyarakat akan kemudahan mobilitas untuk mendukung kegiatan ekonomi (Mangkoesebroto, 2001).

Fasilitas infrastruktur umumnya dibiayai dengan dana publik. Umumnya proyek infrastruktur dihitung dengan *Cost Benefit Analysis* sehingga sulit untuk mengestimasi eksternalitas yang ada sehingga sulit untuk mengestimasi produktivitas infrastruktur tersebut. Menurut The World Bank, Internal Rate of Return proyek-proyek sektor telekomunikasi ± 20 persen per tahun, listrik sebesar 11 persen dan pembangunan jalan sebesar 29 persen. Nilai ini kurang lebih sama dengan sektor swasta. Setiap jenis infrastruktur mempunyai pola masing-masing dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini mempunyai implikasi pada kebijakan dalam menentukan jenis dan investasi yang disalurkan karena pasar cenderung menyediakan modal untuk merespon sinyal dari harga yang menggambarkan keuntungan privat dengan mengabaikan eksternalitas. Karena itu, jika terjadi eksternalitas yang besar, dibutuhkan intervensi pemerintah agar alokasi dana efisien. Pengadaan infrastruktur merupakan hasil kekuatan penawaran dan permintaan, ditambah dari kebijakan publik (Canning, 1999).

Kebijakan publik memainkan peran yang besar terutama karena ketiadaan atau ketidaksempurnaan mekanisme harga pada pengadaan infrastruktur. Namun peningkatan pengadaan infrastruktur terhadap pendapatan tidak dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas pendapatan dari permintaan (*income elasticity of demand*) kecuali biaya infrastruktur sama di semua negara. The World Bank menunjukkan biaya pembangunan jalan di negara berpendapatan menengah kurang lebih $\frac{2}{3}$ dari negara kaya dan negara miskin, hal ini menunjukkan bahwa hubungan GDP per kapita dengan infrastruktur merupakan hasil interaksi yang kompleks lebih dari sekedar penawaran dan permintaan.

Pengeluaran untuk infrastruktur juga merupakan sebuah strategi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Penelitian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dimulai oleh Aschauer (1989) yang meneliti mengenai dampak investasi publik terhadap produktivitas sektor swasta. Hasilnya menunjukkan modal publik adalah produktif dan investasi publik harus ditingkatkan untuk mendorong perekonomian. Selama periode 1949 - 1985, peningkatan 1 persen dari stok modal publik di USA akan meningkatkan output sebesar 0,4 persen. Selain itu *underinvestment* pada infrastruktur di USA sejak tahun 1968 baru mempunyai pengaruh lima tahun kemudian (Sturm, 1996).

Pada praktik kenegaraan di Indonesia, kebijakan fiskal merupakan keputusan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang besar penerimaan, pengeluaran

dan pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditetapkan dengan maksud untuk mengarahkan perekonomian Indonesia mencapai kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Rencana Pembangunan Lima Tahunan atau Propenas. Dengan pengertian yang demikian, kiranya merupakan hal yang wajar bila kebijakan fiskal senantiasa mengalami perubahan dari tahun ke tahun ataupun berubah sejalan dengan masa bakti kabinet pemerintahan atau berubah sejalan dengan pergantian rezim pemerintahan (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi). Mengingat pembangunan yang sedang dilaksanakan maka kebijakan fiskal juga dirancang dan dijalankan dengan berpedoman pada sasaran perbaikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu komponen kebijakan makro ekonomi, maka perancangan dan pelaksanaannya dilakukan koordinasi/sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan dibidang lain (Heru dan Singgih, 2004).

Negara - negara berkembang melakukan investasi sebesar US\$ 200 milyar per tahun untuk infrastruktur baru, nilai ini \pm 4 persen dari output nasional dan 1/5 dari total investasi (The World Bank, 1994). Dampak investasi ini dalam meningkatkan jasa infrastruktur diharapkan sangat besar, namun performa infrastruktur sering mengecewakan. Salah satu penyebabnya adalah kesalahan dalam pengalokasian dana. Misalnya dengan terus melakukan pembangunan infrastruktur baru tanpa melakukan perawatan terhadap infrastruktur yang sudah ada. Dengan tingkat

perawatan yang kurang mencukupi, tingkat efektifitas tenaga listrik di negara berkembang hanya 60 persen dari kapasitas terpasangnya (optimalnya 80 persen) (The World Bank, 1994). Perawatan yang buruk ini tentunya akan mengurangi jasa pelayanan serta meningkatkan biaya bagi penggunaannya.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berakibat pada semakin meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana sosial ekonomi, kekurang mampuan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mengakibatkan banyaknya kerugian antara lain :

1. Kemacetan lalu lintas
2. Polusi lingkungan
3. Ketidaknyamanan hidup
4. Persaingan usaha, dll (Bappenas, 2010).

2.1.1 Pendekatan Pembangunan Infrastruktur Nasional

Infrastruktur memegang peranan penting dan vital dalam mendukung ekonomi, sosial-budaya, kesatuan dan persatuan terutama sebagai modal sosial masyarakat dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia. Secara umum pengembangan infrastruktur sumber daya air ditujukan untuk mendukung program ketahanan pangan dan penyediaan air untuk berbagai keperluan masyarakat seperti air minum pembangkit tenaga listrik dan pengendalian banjir yang

pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, PSD permukiman yang merupakan modal esensial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial-ekonominya. Di samping itu, infrastruktur juga berperan vital dalam mendukung daya saing ekonomi global terutama dalam penyediaan jaringan distribusi, sumber energi maupun input produksi lainnya. Jaringan jalan misalnya, merupakan fasilitas yang menghubungkan sumber-sumber produksi, pasar dan para konsumen, yang secara sosial juga merupakan bagian ruang publik yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi antar kelompok masyarakat guna mengartikulasikan diri dan membangun ikatan sosial budaya. Dalam konteks yang lebih luas, jaringan jalan juga dapat berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu entitas politik yang berdaulat.

2.1.2 Pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah

Alam pengembangan kawasan yang berorientasi ekonomi, pusat-pusat kegiatan yang membentuk kota metropolitan membutuhkan jaringan infrastruktur yang dapat memberikan pelayanan terhadap aktivitas ekonomi yang ada dan menjadi kekuatan pembentuk struktur ruang pada kawasan tersebut. Konsep kota Metropolitan merupakan suatu bentuk permukiman berskala

besar yang terdiri dari satu atau lebih kota besar dan kawasan yang secara keseluruhan terintegrasi, membentuk suatu sistem struktur ruang tertentu dengan satu atau lebih kota besar sebagai pusat dalam keterkaitan ekonomi dan sosial, dan mempunyai kegiatan ekonomi jasa dan industri yang beragam. Untuk itu pada kawasan Metropolitan, baik yang berbentuk monosentris maupun polisentris, jaringan jalan yang ada harus dapat memfasilitasi mobilitas dan kebutuhan pergerakan kendaraan baik dari kota pusat ke kota satelit maupun di antara kota satelit yang ada. Pola jaringan jalan yang dikembangkan sebaiknya terdiri dari jaringan jalan radial dan jaringan jalan lingkaran yang merupakan pola jaringan yang paling efisien untuk kota berukuran cukup besar dan memiliki kecenderungan penyebaran pusat-pusat kegiatan (Hermanto, 2009).

2.1.3 Konseptualisasi Peran Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan, baik dalam konteks fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya. Salah satu infrastruktur yang besar perannya dalam pengembangan dan pembangunan ruang, baik dalam lingkup negara 10 ataupun lingkup wilayah adalah infrastruktur transportasi. Transportasi adalah infrastruktur yang mampu menciptakan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat (barang dan manusia/penumpang), dan menghubungkan *resources* dan hasil produksi ke pasar (perdagangan/*trade*). Transportasi ini pun berdampak pada

kesejahteraan masyarakat seperti, perdagangan antar wilayah, perluasan pasar, terciptanya kompetisi, dan penyebaran pengetahuan, dan meningkatnya aksesibilitas penduduk terhadap sarana pendidikan dan kesehatan dimana pada akhirnya akan meningkatkan pula kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

2.1.4 Pengaruh Infrastruktur Keterkaitan Timbal Balik Antara Infrastruktur dan Ekonomi

Keterkaitan antara infrastruktur dan ekonomi sudah lama menjadi perbincangan bagi para pengambil kebijakan. Bagi para penentu kebijakan, pengembangan dan pembangunan prasarana sudah tentu diharapkan akan menjadi *driving force* bagi pengembangan ekonomi. Sedangkan dalam ranah akademis, keterkaitan antara keduanya masih menjadi bahan perdebatan. Dalam World Development Report tahun 1994 dinyatakan bahwa keterkaitan antara investasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi belum merupakan suatu keniscayaan. Artinya, apakah investasi di infrastruktur menyebabkan pertumbuhan ekonomi atau apakah pertumbuhan ekonomi menyebabkan tumbuhnya investasi di infrastruktur belum sepenuhnya dapat dijelaskan (*established*). Dalam keterkaitan antara infrastruktur dan ekonomi, penelitian Badan Litbang Departemen Perhubungan bekerjasama dengan LPPM ITS pada tahun 2004 menunjukkan, hasil uji Granger *causality* dengan menggunakan data tahun 11 1999-2003 yang dilakukan dengan basis wilayah pulau besar menyatakan bahwa

terdapat hubungan kausalitas antara infrastruktur transportasi dan ekonomi, dan terdapat diferensiasi hubungan kausalitas antara tiap pulau besar tersebut (World Bank, 1994).

2.2 Pengaruh Dampak Bencana Alam Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Bencana alam merupakan *capital shock* yang menggerus jumlah dan nilai modal fisik secara signifikan. Akibatnya tingkat output akan mengalami penurunan drastis. Efek penurunan output akan melebar, mulai penurunan penyerapan tenaga kerja karena perusahaan melihat penurunan permintaan konsumen, pendapatan rumah tangga (*households*) yang berkurang secara signifikan, sampai pada menurunnya pendapatan pajak sebagai penerimaan pemerintah. Penurunan penerimaan pajak ini akan membebani anggaran pemerintah. Padahal ekonomi pascabencana membutuhkan suatu suntikan fiskal yang besar dari pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, dimana perbaikan infrastruktur tersebut bertujuan agar sektor-sektor produksi yang terkena dampak, baik dampak langsung maupun tidak langsung, dapat kembali pulih.

2.2.1 Kategori Dampak Bencana

Benson dan Clay (2004) membagi dampak dari bencana menjadi tiga bagian. Pertama, dampak langsung dari bencana. Dampak langsung meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset-aset ekonomi (misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal

dan tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian, dan sebagainya). Dalam istilah ekonomi, nilai kerugian ini dikategorikan sebagai *stock value*. Adanya bencana menyebabkan penurunan *stock value* dari perekonomian. Kedua, dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung meliputi terhentinya proses produksi, hilangnya output dan sumber penerimaan. Dalam istilah ekonomi, nilai kerugian ini dikategorikan sebagai *flow value*. Ketiga, dampak sekunder (*secondary impact*) atau dampak lanjutan. Contoh dari dampak sekunder bisa berwujud terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana- rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya defisit neraca pembayaran, meningkatnya hutang publik dan meningkatnya angka kemiskinan.

Dampak tidak langsung dari suatu bencana dapat dijelaskan dengan teori produksi. Sesuai konsep dasar produksi, penurunan output yang diakibatkan penurunan modal fisik dapat menurunkan dan/atau meningkatkan penggunaan tenaga kerja. Jika modal fisik merupakan input komplemen dengan tenaga kerja, maka penurunan modal fisik akan diikuti penurunan tenaga kerja, dan hal ini sangat jelas. Sebaliknya jumlah tenaga kerja meningkat jika penurunan modal fisik bisa disubsitusi dengan tenaga kerja.

Dampak sekunder dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa bencana alam mengakibatkan sumber daya pembangunan yang seharusnya bisa disalurkan bagi penambahan modal pembangunan terpaksa direlokasikan untuk pemulihan ekonomi wilayah yang terkena bencana. Hal ini mengindikasikan bahwa pertama, terdapat

kerusakan infrastruktur yang menopang sektor produksi tertentu sehingga mengurangi produktifitas sektor produksi tersebut, dan kedua, terdapat sektor produksi lain yang semestinya mendapatkan kesempatan meningkatkan produktifitas dengan adanya dukungan modal pembangunan menjadi kehilangan atas kesempatan tersebut. Dua indikasi tersebut dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Walaupun terdapat pembiayaan untuk negara-negara yang terkena bencana dari badan-badan donor internasional, sedangkan menurut pendapat lain pembiayaan tersebut tidak menjamin dapat menjaga negara tersebut dari penurunan pertumbuhan perekonomian akibat dampak bencana.

Benson dan Clay mengatakan kunci dari keberhasilan meminimisasi dampak tidak langsung dan dampak sekunder dari bencana adalah adanya respon yang cepat dalam mengatasi dampak langsung bencana. Dalam hal ini, upaya rekonstruksi dan pemulihan harus difokuskan pada upaya merespon dampak langsung akibat bencana yang berwujud kerusakan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian. Selain itu, kecepatan merespon dampak langsung dari bencana ini, sangat tergantung pada kondisi ketahanan ekonomi di wilayah yang terkena bencana. Wilayah yang memiliki ketahanan ekonomi yang kuat akan cenderung memiliki kecepatan pemulihan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah dengan tingkat ketahanan ekonomi yang lemah.

2.3 Definisi Perkembangan Ekonomi

Istilah perkembangan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perubahan jangka panjang. Akan tetapi beberapa para ahli ekonomi tertentu, seperti Schumpoter dan Nyonya Ursula Hicks, telah menarik perbedaan yang lebih lazim antara perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi mengacu pada masalah negara terbelakang sedangkan pertumbuhan ekonomi masalah negara maju. Perkembangan menurut Schumpoter, adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan menggantikan situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk.

Perkembangan ekonomi didefinisikan dalam tiga cara:

1. Perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang. Jadi didalam indikasi perkembangan ekonomi ini, kelonggaran harus di berikan pada perubahan dalam pendapatan nasional nyata akibat pasang naik siklus dan pada perubahan dalam nilai uang serta pertumbuhan penduduk. Disamping itu ada 12 pula kesulitan konsepsi dalam mengaitkan pengukuran pendapatan nasional

dinegara-negara terbelakang yang akan dikaji dengan pendapatan perkapita.

2. Berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata perkapita dalam jangka panjang. Para ekonomi berpendapat sama dalam mendefinisikan pembangunan ekonomi dalam arti kenaikan pendapatan atau output nyata perkapita. Menurut Buchanan dan Ellis, perkembangan berarti mengembangkan potensi pendapatan nyata negara-negara terbelakang dengan menggunakan investasi yang akan dilahirkan berbagai perubahan dan memperbesar sumber-sumber produktif yang pada gilirannya menaikkan pendapatan nyata per orang.
3. Ada kecenderungan untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dari titik titik kesejahteraan ekonomi. Umpama perkembangan ekonomi dipandang suatu proses dimana pendapatan nasional nyata perkapita naik dibarengi penurunan kesejahteraan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan (Jhingan, 2008).

2.4 Perbedaan Antara Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi

2.4.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Cara yang paling mudah membedakan arti pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yaitu dengan menggunakan ungkapan berikut: pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perubahan. Artinya, ada tidaknya

pembangunan ekonomi dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu tidak saja diukur dari kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari perubahan lain yang berlaku dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi, seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan, dan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2006).

Kebanyakan literatur ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber daya alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi dan ,sebagainya. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi juga ditunjang oleh faktor non ekonomi, seperti lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan dari negara tersebut (Yunan, 2009).

Banyak ahli ekonomi maupun ahli fiqih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa

maksud pertumbuhan bukan hanya aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi . Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia (Tariqi, 2004).

2.4.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa indikator untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional adalah indikator pertama yang biasanya menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Caranya adalah dengan membandingkan pendapatan nasional dari satu periode dengan periode sebelumnya. Suatu negara bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika pendapatan nasionalnya meningkat dari periode sebelumnya. Peningkatan pendapatan nasional ini menandakan adanya peningkatan output secara keseluruhan.

2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa rata-rata yang ada atau tersedia

bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita dapat diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Jika suatu negara memiliki pendapatan perkapita yang meningkat dari pada periode sebelumnya maka bisa dikatakan negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi.

3. Tenaga Kerja dan Pengangguran

Indikator pertumbuhan ekonomi berikutnya adalah jumlah antara jumlah tenaga kerja dan pengangguran. Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengangguran merupakan kebalikan dari tenaga kerja. Suatu negara dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi jika jumlah tenaganya lebih tinggi dari jumlah penganggurannya. Atau bisa dikatakan tingkat penganggurannya berkurang dari periode sebelumnya. Tingkat pengangguran dapat berkurang jika terdapat kesempatan kerja yang banyak.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat ini bisa dilihat dari tingkat

kemiskinan yang semakin berkurang dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Daya beli yang meningkat dan merata salah satunya bisa dilihat dari distribusi barang dan jasa yang lancar diseluruh wilayah negara yang bersangkutan. Kesejahteraan masyarakat juga ditandai dengan pendapatan perkapita yang tinggi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Bappenas, 2010).

2.4.3 Pembangunan Ekonomi

Istilah pembangunan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan perubahan jangka panjang. Pembangunan ekonomi mengacu pada masalah negara/masyarakat yang sedang membangun, sedangkan pertumbuhan mengacu pada masalah negara maju.

Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi adalah perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan adalah jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Menurut Bonne, “pembangunan memerlukan dan melibatkan semacam pengarahan, pengaturan, dan pedoman dalam rangka menciptakan kekuatan-kekuatan bagi perluasan dan pemeliharaan, sedangkan ciri pertumbuhan spontan

merupakan ciri perekonomian maju dengan kebebasan usaha (Jhingan, 2008).

Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam tiga pengertian sebagai berikut :

1. Pembangunan ekonomi harus di ukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional riil dalam suatu jangka waktu yang panjang. Definisi ini tidak memuaskan , karena tidak mempertimbangkan berbagai perubahan misalnya pertumbuhan penduduk. Jika suatu kenaikan dalam pendapatan nasional riil dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang lebih cepat, maka yang terjadi bukan kemajuan tetapi adalah sebaliknya yaitu kemunduran.
2. Prof.Meier mendefinisikan pembangunan ekonomi “sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang”. Prof. Baran membenarkan “pertumbuhan “atau pembangunan” ekonomi adalah kenaikan output perkapita barang-barang material dalam suatu jangka waktu”. Definisi diatas menekankan bahwa pembangunan ekonomi mencerminkan oleh tingkat pendapatan riil lebih tinggi dibandingkan tingkat pendapatan penduduk.
3. Ada kecenderungan untuk mendefinisikan pembangunan ekonomi dilihat dari tingkat kesejahteraan ekonomi. Misalnya pendapatan nasional riil perkapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Ada definisi lain yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang, untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Aneka ini bertumpu pada kemajuan teknologi produksi. Secara konvensional pertumbuhan diukur dengan kenaikan pendapatan nasional (PNB atau GNP) perkapita.

Pembangunan (*development*) adalah suatu konsep yang lebih luas. Konsep ini mencakup pula modernisasi kelembagaan, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bukan ekonomi, seperti pemerintah, kota, desa, cara berfikir, tidak saja yang berkenaan dengan tujuan agar dapat memproduksi secara efisien, melainkan juga agar mengkonsumsi secara rasional dan hidup lebih baik. Kesemuanya itu membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi dan mendahului atau berbarengan dengan perubahan sosial. Pembangunan merupakan suatu proses pertumbuhan yang terus menerus menuju perbaikan disegala bidang kehidupan masyarakat dengan bersandar pada seperangkat nilai-nilai yang dianutnya yang mengarahkan mereka untuk mencapai keadaan dan tingkat kehidupan yang didambakan.

Pembangunan hendaknya diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya, inisiatif, daya kreasi, dan kepribadian dari setiap warga masyarakat. Dalam proses ini, pada hakikatnya merupakan proses transportasi sosial, maka perlu dipelihara “pertimbangan segitiga” antara perubahan, ketertiban, dan

keadilan, dengan cara tertentu yang akan memperkokoh kebebasan manusia dalam masyarakat

Pembangunan ekonomi merupakan hanya suatu sub sistem dari suatu proses pembangunan. Makna pertumbuhan ekonomi tidak sebatas pertumbuhan saja, karena pertumbuhan saja tidak cukup. Pembangunan ekonomi tidak akan bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa disertai dengan pembangunan diberbagai bidang dan sektor lain. Demikian pula dengan pengertian pembangunan.

Dari kajian yang dilakukan Ahmad (1997) dapat dirumuskan dasar-dasar filosofis pembangunan ekonomi ini, yaitu : (1) *Tauhid Rububiyah*, yaitu menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam. (2) Keadilan, yaitu pembangunan yang tidak pincang (senjang), tetapi pembangunan ekonomi yang merata (*growht with equity*). (3) *Khilafah*, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah dimuka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab kepada Allah tentang pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya dan (4) *Tazkiyah*, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya dan alam lingkungan, masyarakat dan negara.

Berdasarkan dasar-dasar filosofis diatas, dapat diperjelas bahwa prinsip pembangunan ekonomi menurut Islam adalah :

- a) Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan

merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material didunia, tetapi juga diakhirat.

- b) Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.
- c) Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
- d) Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumberdaya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dilingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu, pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.

2.4.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Didalam melaksanakan pembangunan ekonomi di perlukan landasan teori yang mampu menjelaskan hubungan korelasi antara fakta-fakta yang diamati, sehingga dapat merupakan kerangka

orientasi untuk analisis dan membuat ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan diperkirakan akan terjadi pembangunan wilayah regional merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, sarana dan prasarana, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi, dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas, semua faktor diatas adalah penting, tetapi masih dianggap terpisah-pisah untuk sama lain, dan belum menyatu sebagai komponen yang membentuk basis untuk penyusunan teori pembangunan wilayah (regional) secara komprehensif (Mukhsin, 2011).

2.4.5 Aliran Klasik

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 di pelopori oleh Adam Smith yang di anggap sebagai bapak ekonomi, berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kemajuan teknologi tergantung pada pembentukan modal dengan adanya akumulasi modal akan memungkinkan dilaksanakan spesialisasi atau pembagian kerja sehingga produktifitas tenaga kerja dapat ditingkatkan. Dampaknya akan mendorong penambahan investasi (pembentukan modal) dan persediaan modal (*capital stock*), yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kemajuan teknologi dan menambah pendapatan, bertambahnya pendapatan berarti

meningkatnya kemakmuran (kesejahteraan) penduduk, peningkatan kemakmuran mendorong bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing returns*), yang selanjutnya akan menurunkan akumulasi modal. Doktrin atau semboyan aliran klasik adalah (*laisser fair laisser passer*) atau persaingan bebas. Artinya pemerintah tidak campur tangan dalam perdagangan dan perekonomian.

Pemikiran dan pandangan beberapa tokoh atau pengikut aliran klasik dapat dikemukakan yaitu : menurut Adam Smith untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktifitas tenaga kerja meningkat. Spesialisasi dalam proses produksi akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, untuk selanjutnya akan mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru yang pada akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi, yang berarti meningkat kemakmuran, kesejahteraan penduduk pembangunan dan pertumbuhan itu bersifat akumulatif artinya akan berlangsung terus dan semakin meningkat, bila ada pasar yang cukup besar dan ada akumulasi modal akan mendorong pembagian kerja dan meningkatnya pendapatan nasional dan meningkatnya jumlah penduduk, penduduk selain merupakan pasar karena pendapatannya meningkat, merupakan pula sumber tabungan yang digunakan sebagai akumulasi modal, dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan semakin meningkat.

David berpendapat, bila akumulasi penduduk dan akumulasi modal bertambah terus menerus, maka ketersediaan tanah (lahan) yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka. Maka akibatnya sewa tanah yang subur akan lebih tinggi dari pada tanah yang kurang subur. Perbedaan tingkat sewa tanah adalah karena perbedaan adalah karena perbedaan tingkat kesuburan tanah. Pengelola tanah yang subur akan memperoleh penghasilan dan keuntungan yang tinggi sehingga mampu untuk membayar sewa tanah yang tinggi (Mukhsin, 2011).

Menurut Robert, kenaikan jumlah penduduk yang secara terus menerus konsekuensinya adalah permintaan akan bahan pangan semakin meningkat. Tingkat pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan tingkat pertumbuhan bahan pangan mengikuti deret hitung artinya akan terjadi (gap) atau ketimpangan yang semakin besar antara jumlah penduduk dan jumlah bahan pangan yang dibutuhkan. Hal ini berdampak terhadap semakin menurunnya 18 tingkat kemakmuran (kesejahteraan) penduduk. Malthus lebih realitas dalam menganalisa pertumbuhan penduduk, menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi, malahan pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Sebagai mana yang di tulis Malthus “pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding, jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat, kondisi demikian mendorong pertumbuhan

penduduk. Akan tetapi pertumbuhan penduduk saja tidak akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Peningkatan pada permintaan efektif akan menyebabkan meningkatnya kesejahteraan (Jhingan, 2006).

2.5 Model dan Strategi Ekonomi Wilayah

Masalah pokok ekonomi secara umum (nasional ekonomi atau lokal) mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan konsumsi, produksi, distribusi, dan pertumbuhan. Semua satuan ekonomi, baik individu ataupun negara dan masyarakat, selalu menghadapi masalah tersebut.

1. Konsumsi. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anggota masyarakat akan menentukan jenis barang dan jasa yang hendak mereka konsumsi. Pilihan itu sangat beragam, mulai dari pangan, sandang, pemukiman, sampai kepada kebutuhan kesehatan, pendidikan, transportasi, rekreasi, dan lainnya.
2. Produksi. Barang dan jasa dapat diproduksi dengan menggunakan berbagai cara produksi, tergantung dari tingkat dan skala produksinya. Membangun jalan dapat dilakukan dengan menggunakan pasir dan kerikil saja (berkulitas “asal lewat saja” atau ALS), atau dengan mencampur bahan-bahan ini dengan aspal (*hot mik*) atau semen (*boton*). Pembangunannya dapat dilakukan dengan mengarahkan banyak orang yang khusus dan tenaga manusia yang sedikit

saja. Tingkat teknologi akan digunakan untuk menentukan batas pilihan produksi, demikian pula pilihan konsumsi.

3. Distribusi. Barang yang diproduksi akan didistribusikan kepada penduduk yang membutuhkan yang terbesar diseluruh daerah. Distribusi barang dapat dilakukan dengan beberapa cara, menggunakan sarana angkutan darat, laut atau udara, dan memilih yang cepat, terjamin keselamatannya, murah dan nyaman.
4. Pertumbuhan. Kehidupan masyarakat tidak hanya untuk saat sekarang (jangka pendek) tapi juga untuk masa yang akan datang (jangka panjang). Penduduk bertambah jumlahnya, manfaat sumber daya alam ditingkatkan dengan menggunakan teknologi yang lebih maju untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Berarti melakukan pertumbuhan. Pertumbuhan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi tepat guna untuk teknologi canggih, dapat pula bersifat padat tenaga kerja atau padat modal (Sukirno, 2006).

Masalah utama lainnya yang dihadapi pembangunan wilayah adalah keterbelakangan ekonomi. Upaya masyarakat dibanyak wilayah dalam memanfaatkan atau mengolah sumber daya alamnya belum berhasil sepenuhnya, faktor utamanya karena sebagian dari penduduknya masih relatif terbelakang secara ekonomi (*economically backwardness*) dalam arti bahwa kapasitas (kualitas) penduduk sebagai faktor produksi adalah rendah, yang

tercermin dari produktifitas tenaga kerja yang rendah dan mobilitas faktor yang terbatas.

Produktifitas tenaga kerja yang rendah pada umumnya karena:

- a. Derajat kesehatan yang rendah
- b. Tingkat pendidikan yang rendah
- c. Pelatihan yang terbatas
- d. Hambatan terhadap mobilitas antara pekerjaan, dan
- e. Rendahnya kinerja (prestasi kerja).

Meskipun produktifitas rendah namun pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah terbelakang (tertinggal) ekonominya ternyata telah menunjukkan keberhasilan yang positif. Namun sebagian penduduk masih mempunyai gaya hidup tradisional, pandangannya masih berjangka pendek (*short-sighted*), kurang berorientasi kepada masa depan dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) meskipun mempunyai keterampilan yang belum dimanfaatkan secara optimal, akan tetapi kurang memiliki kemauan dan daya dorong untuk melakukan perubahan untuk mencapai kemajuan ekonomi masyarakat lokal.

Masih kurang dinamisnya sebagian masyarakat lokal adalah berkaitan dengan nilai kultural masyarakat. Untuk mendinamisasi hasrat dan semangat masyarakat untuk melakukan perubahan, maka harus dilakukan pembangunan yang multi dimensional dan multi sektoral, bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi harus pula meliputi bidang sosial-budaya, bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat mental spiritual, yang dilakukan secara serentak dan

serampak, artinya dilakukan secara bersama-sama meliputi seluruh bidang dan sektor.

Dari masalah-masalah diatas, implikasinya dalam lingkup regional yaitu terlihat ketimpangan atau kesenjangan antar sub wilayah yang maju dengan sub wilayah yang kurang maju. Ketimpangan atau kesenjangan tersebut akan menimbulkan kesenjangan saling keterkaitan (*interrelationship*) dan saling ketergantungan (*interdependency*) ketimpangan atau kesenjangan antar daerah (sub wilayah) harus dikurangi menjadi sekecil mungkin. Daerah yang relatif maju tingkat pertumbuhannya dikendalikan agar tidak terlalu tinggi sedangkan daerah yang kurang maju didorong agar tingkat pertumbuhan lebih tinggi. Daerah yang terisolasi, yang terpencil, yang terletak dipembatasan, dan daerah-daerah tertinggal (yang memiliki sumber daya alamnya yang terbatas), demikian pula daerah-daerah yang padat penduduknya maupun yang kurang penduduknya, kesemuanya seharusnya diberi perhatian untuk dikembangkan secara proporsional (Sukirno, 2006).

2.6 Model Pembangunan Ekonomi Wilayah

Model pembangunan diartikan sebagai kerangka berfikir yang obyektif dan rasional berdasarkan konsep, teori dan paradigma dalam bentuk konstruksi strategis guna memecahkan berbagai masalah bagi kepentingan masyarakat. Model pembangunan dapat dilihat berbagai demensi, dilihat dari berbagai

dimensi, dilihat dari dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, administrasi dan lainnya. Berdasarkan perkembangannya, model pembangunan ekonomi yang banyak digunakan oleh negara-negara berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Model I, menitik beratkan pada pertumbuhan produk domestik (PDB) yang berkembang pada dekade 1950-an dan 1960-an.
- b. Model II, menitik beratkan pada pemerataan dan pemenuhan pada kebutuhan pokok yang berkembang pada dekade 1970-an.
- c. Model III, menitik beratkan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkembang pada dekade 1980-an.
- d. Model IV, yang berkembang pada abat ke-20 dan memasuki abat ke-21, dimana dunia mengalami perubahan yang sangat mendasar, yaitu memasuki era globalisasi dan liberalisasi perdagangan bebas dan persaingan bebas antar Negara akan menjadi ketat, maka diperlukan penguatan daya saing ekonomi masing-masing wilayah.

2.6.1 Model pembangunan I

Model pembangunan I ini berorientasi pada peningkatan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB). Strategi perencanaan pembangunan yang digunakan dalam model ini mendapat pengaruh kuat dari teori Harrod-domar dan tahapan pertumbuhan rostow. Model pertumbuhan Harrod-domar dapat

digunakan untuk analisis pertumbuhan regional dengan menghitung perpindahan modal dan tenaga kerja antar regional.

2.6.2 Model Pembangunan II

Kritik terhadap kelemahan model pembangunan I telah mendorong munculnya model pembangunan II, model pembangunan I lebih menekankan pada aspek ekonomi, dengan modernisasi dan industrialisasi yang kurang seimbang telah menimbulkan pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan. Strategi pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan pada aspek sosial, lingkungan dan kelembagaan, tidak menjangkau lapisan masyarakat yang miskin (terbawah). Ternyata manfaat pertumbuhan tidak merembes (menyebarkan) kebawah keberbagai lapisan masyarakat, yang miskin.

2.6.3 Model Pembangunan III

Model pembangunan III lebih menekankan pada kegiatan aparatur pemerintah yang bertanggung jawab dan berupaya membangkitkan kesadaran dan kemampuan instansi dan individual dan kolektif. Manajemen dan administrasi pemerintahan dianggap mempunyai peranan menentukan dalam pelaksanaan model pembangunan III yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai “*community based resources development*”.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan kepada pembentukan kemampuan masyarakat yang di arahkan kepada :

- a. Secara bertahap , prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk pembangunan diserahkan kepada masyarakat.
- b. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber daya pembangunan.
- c. Pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara optimal.
- d. Pengembangan jaringan kerja secara terkoordinasi antara aparat pemerintah, lembaga-lembaga swasta, dan masyarakat secara luas.

2.6.4 Model Pembangunan IV

Model pembangunan ini muncul bersamaan dengan perkembangan dan kemajuan bidang transportasi yang sangat pesat sehingga mendorong berkembangnya, perdagangan antar wilayah yang lebih intensif dan interaktif secara luas. Model pembangunan ini menekan pada peningkatan daya saing dan ketahanan manajemen pemerintahan dan pembangunan mampu menghadapi perkembangan dan tantangan.

2.7 Strategi Pembangunan Ekonomi Wilayah

Agar berkembang dengan cepat dan selaras dengan potensi sumber daya yang dimiliki dan sasaran ekonomi dan sosial yang telah ditetapkan, strategi apakah yang harus ditetapkan oleh suatu wilayah. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan pada akhirnya ditunjukkan pada pemerintah daerah, merupakan pemegang

kekuasaan untuk mengambil keputusan menentukan kebijakan pembangunan yang tepat.

2.7.1 Strategi Pembangunan Prasarana

Investasi pembangunan untuk prasarana sangat besar bila ditinjau dari kemampuan perusahaan swasta untuk melaksanakannya, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembangunan mempunyai kegunaan eksternal bagi perekonomian, dalam arti manfaatnya dinikmati sama-sama oleh masyarakat. Prasarana ekonomi merujuk pada investasi yang berupa jalan umum, sistem pengangkutan, irigasi, sistem pembuangan air dan pengendalian banjir, pelayanan air bersih dan sebagainya (Rahardjo Sasmita, 2005).

2.8 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Dalam ekonomi syariah, asumsi antara pertumbuhan dan distribusi diminimalisir dengan mengubah paradigma konflik antara pertumbuhan dengan distribusi, melalui penciptaan berbagai instrumen dan mekanisme yang bisa menjamin tumbuhnya ekonomi disatu sisi, dan terciptanya distribusi di sisi yang lain. Konsepsi ini terefleksikan dalam kesatuan bangunan di antara tiga sektor dalam perekonomian syariah, yaitu sektor riil, sektor keuangan syariah dan sektor ZISWAF (zakat, infak, sedekah dan wakaf).

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak sekedar terkait dengan

peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Dalam perspektif ekonomi syariah, paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Ketiganya adalah :

- 1) *Invisible resources* (sumber daya yang dapat diinvestasikan)
Yang dimaksud dengan *Invisible resources* adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumberdaya tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumberdaya modal.
- 2) Sumberdaya manusia dan *entrepreneurship* Faktor kedua adalah SDM *entrepreneurship*. Ketika basis ekonomi syariah adalah sektor riil, maka memiliki SDM *entrepreneurship* yang mampu menggerakkan sektor riil adalah sebuah keniscayaan. Disinilah pentingnya peran pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non formal. Tingginya kebutuhan akan SDM berkualitas dalam pengembangan ekonomi syariah harus bisa diatasi melalui program pendidikan yang terencana dengan baik.
- 3) Teknologi dan inovasi faktor yang ketiga adalah teknologi dan inovasi. *Technology progress* disadari merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi ini

adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah. Islam adalah ajaran agama yang memerintahkan umatnya untuk senantiasa inovatif. Dalam sebuah hadits, Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya (*al mu'min al muhtarif*)” (HR.Baehaqi).

Makna *al mu'min al muhtarif* ini sangat erat kaitannya dengan inovasi, karena setiap karya itu pada dasarnya lahir dari sebuah inovasi dan kreativitas. Tanpa inovasi dan kreativitas, tidak mungkin akan lahir sebuah karya. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam Islam akan berjalan dengan baik manakala masyarakat memahami kewajibannya untuk menghasilkan karya melalui proses-proses yang kreatif dan inovatif (Syauqi, 2016).

2.9 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
A | Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sibarani, <i>Kontribusi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di</i>	Metode Uji regresi panel data	Hasil regresi menunjukkan bahwa infrastruktur memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan per

	<i>Indonesia. 2002</i>		kapita. Nilai kontribusi yang dihasilkan berbeda untuk setiap jenis infrastruktur dan wilayah. Untuk wilayah yang lebih kecil, nilai kontribusinya lebih besar. Elastisitas setiap variabel di bawah satu dan secara keseluruhan semua input memberikan decreasing return to scale
2	Krismanti Tri Wahyuni, <i>Analisis pengaruh infrastruktur ekonomi dan sosial terhadap produktivitas ekonomi di Indonesia. 2009</i>	Metode analisis regresi data panel	Menunjukkan hasil bahwa infrastruktur jalan, listrik, dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas ekonomi di Indonesia dengan menggunakan data panel. PDRB riil pertanaga kerja menjadi variabel independen, sedangkan yang menjadi variabel dependennya adalah variabel jalan, listrik, air bersih dan kesehatan.
3	Harry Kurniadi Atmaja dan Kasyul Mahalli, <i>Pengaruh Peningkatan</i>	Metode penelitian analisis deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian	Menunjukkan hasil bahwa Infrastruktur jalan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan

	<p><i>Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga. 2013</i></p>	<p>empiris.</p>	<p>pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga, artinya variabel yang bernilai positif itu mempunyai arti semakin tinggi nilai dari variabel jalan, maka akan diikuti dengan meningkatnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi nilai variabel jalan, maka akan semakin menurun pula tingkat pertumbuhan ekonomi.</p>
4	<p>Tunjung Hapsari, <i>Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 2011</i></p>	<p>Metode analisis data panel</p>	<p>Menyatakan bahwa infrastruktur jalan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat apabila panjang jalan naik sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0.176396 persen, begitu juga dengan infrastruktur listrik yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan</p>

			<p>ekonomi di Indonesia dengan tingkat keyakinan sebesar 95 persen. Berbeda dengan infrastruktur jalan dan listrik, infrastruktur telepon dan infrastruktur air tidak mempunyai pengaruh signifikan dan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia</p>
--	--	--	---

2.10 Kerangka Pemikiran

Kondisi perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh demografi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, aksesibilitas dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan, serta aspek potensi pasar. Kekuasaan dalam pengambilan keputusan ini termasuk didalamnya adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Keterkaitan infrastruktur dalam pembangunan ditunjukkan oleh pertumbuhan output. Ketersediaan infrastruktur yang kurang menyebabkan potensi sumber daya di daerah tersebut sulit berkembang. Banyak penelitian telah membuktikan, jika infrastruktur suatu daerah berkembang baik, terutama infrastruktur jalan, maka akan merangsang peningkatan pendapatan masyarakatnya. Karena aktivitas ekonomi daerah ini meningkat

akibat semakin tingginya dan semakin mudahnya mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Besar pasca bencana Tsunami Aceh dalam penelitian ini didapat melalui kebijakan fiskal, yaitu melalui pembiayaan untuk infrastruktur yang telah disusun berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembangunan infrastruktur diharapkan akan mendorong investasi baik dari dalam maupun luar negeri, investasi tersebut diharapkan akan meningkatkan pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Besar, pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Besar.

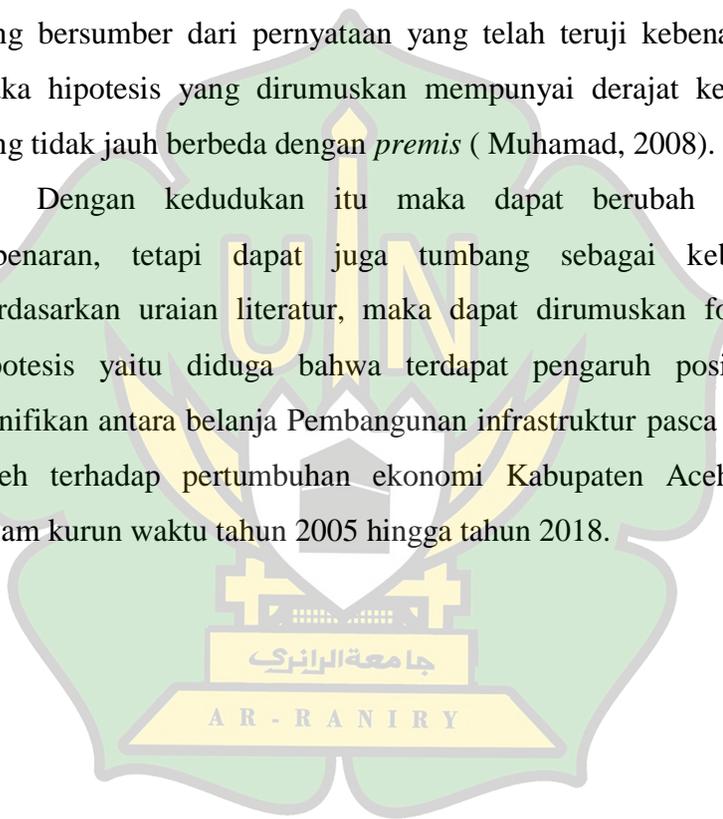


Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.11 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian. Hipotesis merupakan hasil akhir dari proses berpikir deduktif (logika deduktif). Logika deduktif adalah menganut asas *koherensi*, mengingat premis merupakan informasi yang bersumber dari pernyataan yang telah teruji kebenarannya, maka hipotesis yang dirumuskan mempunyai derajat kebenaran yang tidak jauh berbeda dengan *premis* (Muhamad, 2008).

Dengan kedudukan itu maka dapat berubah menjadi kebenaran, tetapi dapat juga tumbang sebagai kebenaran. Berdasarkan uraian literatur, maka dapat dirumuskan formulasi hipotesis yaitu diduga bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara belanja Pembangunan infrastruktur pasca tsunami Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar dalam kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2018.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).

Penelitian ini akan membahas tentang seluruh belanja yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar pasca bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, dalam kurun waktu 2005 – 2018.

3.2 Data dan Teknik Perolehannya

Penelitian ini menggunakan jenis data Sekunder yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kabupaten Aceh Besar serta data-data yang di publikasikan melalui tulisan ilmiah, Literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan penulisan ini (Infrastruktur dan pertumbuhan

Ekonomi). Data tersebut selanjutnya di analisis dengan melakukan pendekatan metode kuantitatif.

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011).

Metode yang penulis gunakan dalam memperoleh data yaitu dengan datang langsung ke Kantor BPS Provinsi Aceh, Dinas PUPR Kabupaten Aceh Besar untuk memperoleh data sekunder mengenai belanja infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar.

3.3 Lokasi dan Objek Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan relevan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini, penelitian ini berlokasi di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah tata kelola anggaran sebagai variabel independen, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar tahun 2005-2018 sebagai variabel dependen.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. *Field Research*

Data tersebut didapat melalui data-data yang sudah ada artinya data tersebut berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi

Aceh, dan Dinas PUPR Kabupaten Aceh Besar serta data-data yang dipublikasikan melalui tulisan ilmiah

2. Library Research

Ini dilakukan melalui pendekatan tinjauan pustaka artinya mengkaitkan antara teori-teori dengan sumber-sumber data yang ada dan telah didapat.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel adalah sesuatu yang dijadikan objek penelitian atau yang diteliti periode waktu yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah tahun 2005-2018. Dalam penelitian terdapat 2 (dua) variabel yaitu:

1. Variabel independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur di kabupaten Aceh Besar.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak penyimpangan yang terdapat di dalam data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Asumsi klasik yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah: uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, distribusi sebuah data variabel dependen dan independen keduanya mengikuti atau mendekati distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki pola seperti distribusi data normal atau mendekati normal, yakni distribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan (Santoso) dalam (Nafilah, 2016).

3.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Nafilah, 2016).

3.6.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya maupun nilai periode

sesudahnya. Autokorelasi adalah keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya (t-1), model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test).

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) menurut Danang Sunyoto (2013) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 atau $DW < -2$
2. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$.

Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas 2 atau $DW > 2$ (Priyatno, 2012).

3.7 Teknik Analisis

3.7.1 Regresi Linier Sederhana

Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara belanja infrastruktur (X), Dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Aceh Besar (Y). Dengan rumus sebagai berikut : (Supranto, 2000)

$$Y_i = a + b (X_i) + e_i$$

Dimana :

Y_i : pertumbuhan ekonomi

a : *intercept*

b : koefisien regresi

X_i : pembangunan infrastruktur

e_i : *expected value*

3.7.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian pada penelitian ini digunakan uji satu pihak kanan dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,05 (Sugiyono, 2009).

- a. Jika tingkat signifikansi $t_{hitung} > 0,05$ maka H_a ditolak
- b. Jika tingkat signifikansi $t_{hitung} < 0,05$ maka H_a diterima

3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Koefisien determinasi dapat diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi atau R Squared (R^2). Koefisien determinasi juga menjelaskan besarnya masing-masing pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga dapat diketahui variabel bebas mana yang memiliki efek paling dominan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011).

3.8 Definisi Operasional Variabel

Agar tidak menimbulkan pengertian ganda tentang variabel-variabel utama pada penelitian ini, maka akan dijelaskan definisi masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur (X) merupakan seluruh belanja infrastruktur yang di alokasikan oleh pemerintah daerah pada Kabupaten Aceh Besar.
2. Pertumbuhan ekonomi (Y) merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar, dalam kaitannya dengan belanja infrastruktur.

3.9 Pengujian Hipotesis

Hipotesis penilaian ini adalah jawaban terhadap masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian sehubungan dengan penelitian diatas yang menjadi hipotesis penelitian ini adalah belanja infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar.

Hipotesa statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. $H_0; \beta = 0$ belanja infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar.
- b. $H_1; \beta \neq 0$, belanja infrastruktur berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Besar

4.1.1 Sejarah Kabupaten Aceh Besar

Sebelum dikeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1956, Kabupaten daerah Tingkat II Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kewedanaan yaitu:

1. Kewedanaan Selimum
2. Kewedanaan Lhoknga
3. Kewedanaan Sabang

Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh Besar disahkan menjadi daerah otonomi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 dengan ibukotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasaan luas, Banda Aceh sebagai pusat ibu kota dianggap kurang *efisien* lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibukota tersebut dari Wilayah Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, dimana lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Banda Aceh usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibukota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimum tepatnya Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah kotamadya Banda Aceh. Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Jantho di Kecamatan Seulimum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh team departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan konsultan PT. Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah kemukiman Jantho dengan nama “KOTA JANTHO”.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besaryang baru, maka secara bertahap pemidahan ibukota terus dimulai , dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke ibukota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soeparjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Besar

Visi dari Kabupaten Aceh Besar yaitu Terwujudnya Aceh Besar yang maju, sejahtera dan bermartabat dalam syariah Islam.

Misi dari Kabupaten Aceh Besar yaitu:

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam
2. Meningkatkan sumber daya manusia dibidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pemberdayaan komunitas
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*)
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur disegala bidang
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis mukim dan gampong
6. Meningkatkan percepatan laju pembangunan masyarakat *pesisir, terisolir*, dan tertinggal.

4.1.3 Letak Geografis Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis $5,05^{\circ}$ - $5,75^{\circ}$ Lintang Utara dan $94,99^{\circ}$ - $95,93^{\circ}$ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah $2.903,50 \text{ km}^2$ sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil

berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa *pesisir*.

Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim dan 604 Gampong/Desa. Jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat Kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh, yaitu berjarak 106 km dengan pusat ibukota Kabupaten (ibukota terletak di Kecamatan Kota Jantho).

Kabupaten Aceh Besar juga memiliki Kawasan Hutan baik berupa Kawasan Lindung maupun Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung memiliki luas 171.367,22 hektar, dimana Hutan Lindung merupakan areal terluas yaitu mencapai 41,08 persen dari luas Kawasan Lindung yang ada atau seluas 70.402,49 hektar. Kemudian disusul dengan Hutan Produksi seluas 68.549,43 hektar. Sedangkan Kawasan Budidaya yang merupakan Hutan Produksi tetap memiliki luas 41,28 hektar.

4.1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Besar

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut hasil estimasi tahun 2018 adalah 417.302 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 214.004 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 203.298 jiwa dengan sex ratio 105,27.

Jika dilihat dari jumlah penduduk di tingkat kecamatan, kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah yang berjumlah 55.350 jiwa, sedangkan

Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Leupung yaitu sebanyak 3.038 jiwa.

Walaupun penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Krueng Barona Jaya ternyata menjadi Kecamatan terpadat pertama dengan rata-rata 2.410 jiwa/km². Sedangkan di Kecamatan Darul Imarah 2.273 jiwa/km² dan yang terjarang terdapat di Kecamatan Kota Jantho yaitu hanya 17 jiwa/km².

Perkiraan penduduk pada pertengahan tahun menurut kelompok umur di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018 yang paling banyak berada pada selang umur 0-4 tahun yaitu berjumlah 47.365 jiwa, dimana jumlah laki-laki sebanyak 24.328 jiwa dan perempuan 23.037 jiwa.

Sedangkan kelompok umur yang jumlah penduduknya paling sedikit berada pada rentang usia 70-74 tahun, yang hanya berjumlah 4.474 jiwa, dimana jumlah perempuan yaitu 2.544 jiwa laki-laki dan 1.930 jiwa perempuan.

4.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur Aceh Besar

Tabel 4.1
Perkembangan Realisasi Belanja Infrastruktur Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2018

No	Tahun	Belanja Infrastruktur (rupiah)	Laju Pertumbuhan (%)
1	2005	10.500.655.200	3,61
2	2006	12.600.550.000	3,99
3	2007	13.933.883.100	4,79
4	2008	15.945.994.450	5,31
5	2009	15.816.546.100	5,50
6	2010	17.908.765.385	6,16
7	2011	15.111.031.000	5,19
8	2012	19.129.720.200	6,58
9	2013	23.813.984.500	8,19
10	2014	25.818.945.200	8,88
11	2015	28.984.638.000	9,96
12	2016	30.740.644.217	10,57
13	2017	33.264.094.934	11,43
14	2018	28.657.674.000	9,85

Sumber: Dinas PUPR Aceh Besar, 2019

Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sebagainya yang merupakan social overhead capital, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi

dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional.

Infrastruktur merupakan salah satu indikator yang menggambarkan semakin meningkatnya pertumbuhan infrastruktur maka akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Di Kabupaten Aceh Besar pasca bencana gempa dan tsunami tahun 2004 dilihat banyak sekali pembangunan infrastruktur yang dibangun. Berdasarkan tabel 4.1 realisasi alokasi belanja infrastruktur jalan, jembatan dan air bersih pasca bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 di Kabupaten Aceh Besar dalam kurun waktu empat belas tahun hampir tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 realisasi belanja infrastruktur sebesar Rp.10.500.655.200 dengan laju pertumbuhan 3,61 persen, pada tahun 2006 terjadi peningkatan realisasi belanja infrastruktur yaitu Rp.12.600.550.000 dengan laju pertumbuhan 3,99 persen, pada tahun 2007 meningkat realisasi anggaran Rp.13.933.883.100 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,79 persen, kemudian pada tahun 2008 yang dikeluarkan belanja infrastruktur yaitu Rp.15.445.994.450 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,31 persen, pada tahun 2009 dengan total belanja infrastruktur sebesar

Rp.15.990.546.100 mengalami sedikit laju pertumbuhan dari tahun sebelumnya yaitu 5,50 persen, pada tahun 2010 realisasi belanja infrastruktur sebesar Rp.17.908.765.385 dengan laju pertumbuhan 6,16 persen, Namun pada tahun 2011 realisasi belanja infrastruktur mengalami sedikit penurunan sebesar Rp.15.111.031.000 dengan laju pertumbuhan 5,19 persen, pada tahun 2012 realisasi belanja infrastruktur mengalami peningkatan sebesar Rp.19.129.720.200 dengan laju pertumbuhan 6,58 persen, pada tahun 2013 realisasi belanja infrastruktur mengalami peningkatan sebesar Rp.23.813.984.500 dengan laju pertumbuhan 8,19 persen, pada tahun 2014 realisasi belanja infrastruktur sebesar Rp.25.818.945.200 dengan laju pertumbuhan 8,88 persen, pada tahun 2015 realisasi belanja infrastruktur meningkat sebesar Rp.28.984.638.000 dengan laju pertumbuhan 9,96 persen, pada tahun 2016 realisasi belanja infrastruktur mengalami peningkatan sebesar Rp.30.740.644.217 dengan laju pertumbuhan 10,57 persen, pada tahun 2017 realisasi belanja infrastruktur meningkat sebesar Rp.33.264.094.934 dengan laju pertumbuhan 11,43 persen, kemudian ditahun 2018 kembali mengalami penurunan realisasi anggaran infrastruktur sebesar Rp.28.657.674.000 dengan laju pertumbuhan 9,85 persen.

4.2.2 Gambaran Umum Pertumbuhan Ekonomi Aceh Besar

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan pertumbuhan barang dan jasa yang antara lain diukur dengan besarnya PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

merupakan neraca makro ekonomi yang dihitung secara konsisten dan terintegrasi berdasarkan konsep, definisi, klasifikasi dan cara perhitungan yang telah disepakati secara internasional. Tujuan menghitung PDRB adalah untuk mengetahui total produksi barang dan jasa pada suatu wilayah selama kurun waktu tertentu. Perbedaan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari waktu ke waktu terjadi karena 2 (dua) hal, yaitu terjadinya perubahan harga barang dan jasa atau terjadinya perubahan volume.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara atau daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Namun untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi maka menggunakan nilai atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Perhitungan PDRB Aceh Besar setiap tahun mengalami perbaikan.

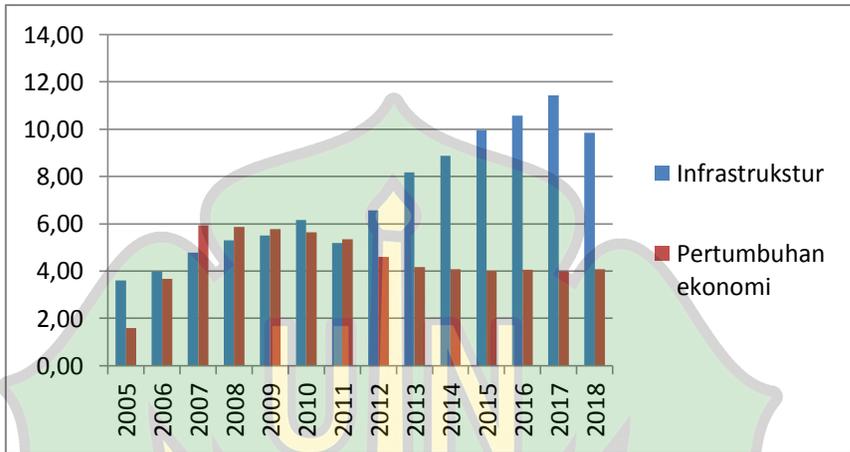
Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Besar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha tahun 2005-2018 dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
PDRB Kabupaten Aceh Besar Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005-2018

No	Tahun	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (jutaan rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2005	1.732.496	1,59
2	2006	1.796.097	3,67
3	2007	2.135.114	5,94
4	2008	2.258.276	5,86
5	2009	2.405.000	5,77
6	2010	2.520.172	5,65
7	2011	2.655.745	5,34
8	2012	2.736.180	4,61
9	2013	7.863.467	4,16
10	2014	8.184.458	4,08
11	2015	8.513.245	4,02
12	2016	8.854.440	4,05
13	2017	9.208.377	4,00
14	2018	9.586.678	4,08

Sumber : BPS Provinsi Aceh, 2019

Gambar 4.1
Perkembangan Realisasi Belanja Infrastruktur dan
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2005-2018



Sumber : data diolah, 2019

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik perlu dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, distribusi sebuah data variabel dependen dan independen keduanya mengikuti atau mendekati distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki pola

seperti distribusi data normal atau mendekati normal, yakni disribusi data tersebut tidak melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan (Santoso, 2010) Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan tabel. Hasil uji normalitas dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Software SPSS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		14
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	972980,0037945
Most Extreme Differences	Absolute	,144
	Positive	,188
	Negative	-,144
Test Statistic		,144
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

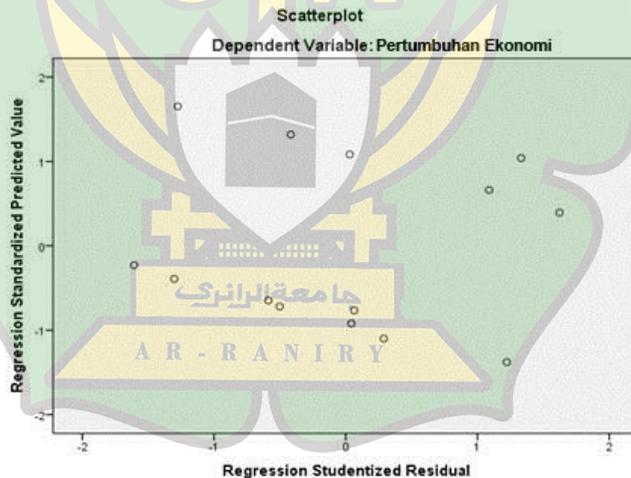
Sumber: Data diolah,2019

Tabel 4.3 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual terstandarisasi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan

software spss dapat dilihat nilai sig yang diperoleh sebesar 0,200 yang bernilai $>$ dari 0.05 serta dimana grafik histogram memiliki pola distribusi yang melenceng kekanan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut memiliki distribusi residual yang normal. Maka model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan model terdistribusi dengan normal.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Metode Scatterplot



Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Untuk melihat ada atau tidaknya gejala

heterokedastisitas dalam model regresi maka dilakukan menggunakan analisis statistik metode *Scatterplot*. Dibawah ini merupakan tabel hasil uji statistik pada output *software spss*.

Berdasarkan grafik output *Scatterplot* diatas, menunjukkan bahwa titik-titik tersebar acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi tersebut atau H_0 diterima.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya maupun nilai periode sesudahnya. Autokorelasi adalah keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode tertentu dengan residual pada periode sebelumnya (t-1), model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Berikut adalah hasil uji statistik menggunakan *software spss*.

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,956 ^a	,915	,908	1012709,69603	1,884
a. Predictors: (Constant), Laju Belanja Infrastruktur					
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi					

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai $DW = 1,884 >$ dari batas atas DU (tabel) 1.3314 dan $< (4-Du) 4-1.3314 = 2,6686$. Maka $DW > DU$ dan $DW < 4-U$ sehingga dapat disimpulkan data bebas dari autokorelasi.

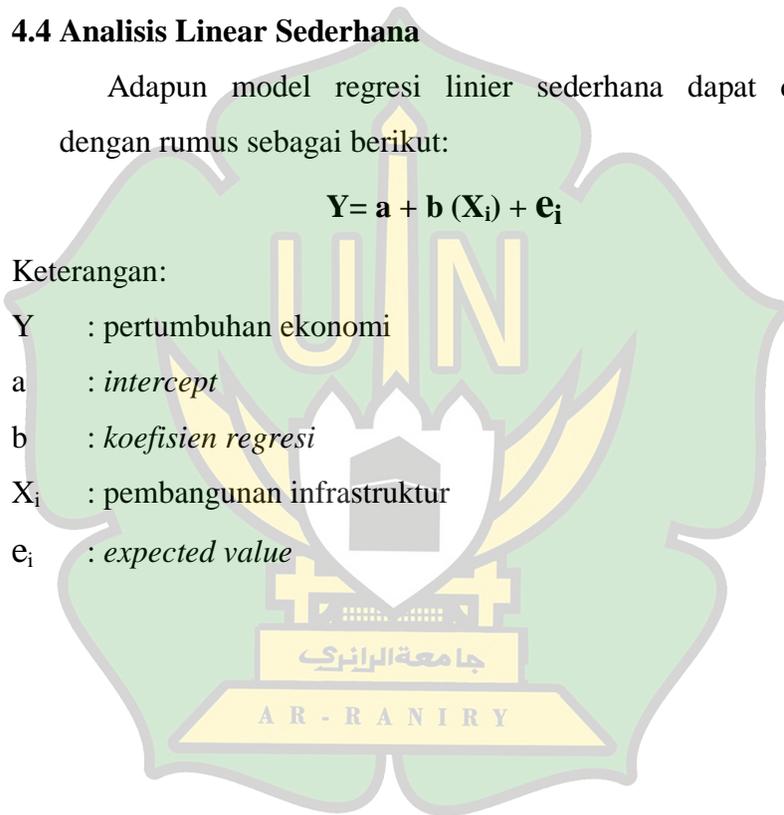
4.4 Analisis Linear Sederhana

Adapun model regresi linier sederhana dapat disusun dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b (X_i) + e_i$$

Keterangan:

- Y : pertumbuhan ekonomi
- a : *intercept*
- b : *koefisien regresi*
- X_i : pembangunan infrastruktur
- e_i : *expected value*



Berikut ini merupakan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan *software spss*.

Tabel 4.5
Hasil Regresi Sederhana

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3821002,808	825582,855		4,628	,001		
	Belanja Infrastruktur	,000	,000	,956	11,351	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana pada output tabel diatas diperoleh nilai signifikan (Sig.) 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh positif Pembangunan Infrastruktur (X) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) dan konstanta sebesar -3821002,808 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = (-3821002,808) + 0,000 X$$

Adapun persamaan regresi linier sederhana diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Konstanta

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat dilihat bahwa nilai konstan dari unstandardized coefficient sebesar -3821002,808. Nilai konstan ini menyatakan bahwa apabila pembangunan infrastruktur sama dengan nol maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar rata-rata -3821002,808.

b. Koefisien regresi dari variabel infrastruktur (X)

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat kita lihat bahwa nilai koefisien variabel infrastruktur (X) bernilai positif adalah 0,000 hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan infrastruktur sebesar 1 rupiah akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar sebesar 0,001

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian pada penelitian ini digunakan uji satu pihak kanan dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,05 (Sugiyono, 2009).

a. Jika tingkat signifikansi $t_{hitung} > 0,05$ maka H_a diterima

b. Jika tingkat signifikansi $t_{hitung} < 0,05$ maka H_a ditolak

Fungsi uji t adalah untuk menentukan signifikan suatu variabel bebas secara individual dalam mempengaruhi variabel terikat. Dalam hal ini rumus yang digunakan sebagai berikut:

Hipotesis ditetapkan sebagai berikut:

$H_0: \beta_1=0$ = tidak ada pengaruh

$H_1: \beta_1 \neq 0$ = ada pengaruh

Berikut ini merupakan hasil uji parsial (uji t) dengan menggunakan *software spss*.

Tabel 4.6
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3821002,808	825582,855		-4,628	,001
	Belanja Infrastruktur	,000	,000	,956	11,351	,000

a. Dependent Variable: Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar $11,351 > t_{tabel} 2,144$ Dikarenakan nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 (derajat signifikan) maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima maka secara parsial laju pembangunan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar.

4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, lakukan uji *R Square* (R^2)

dengan bantuan *software spss*. Berikut ini merupakan hasil uji *R Square* (R^2).

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,956 ^a	,915	,908	1012709,69603	1,884
a. Predictors: (Constant), Laju Belanja Infrastruktur					
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi					

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel 4.8 di atas dapat dilihat nilai R^2 sebesar 0.915 interpretasinya adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar periode tahun 2005-2018 adalah sebesar 91,5% sedangkan sisanya 8,5 % dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil output penelitian diatas variabel Infrastruktur mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar, artinya pasca kejadian bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 mengalami laju pertumbuhan infrastruktur yang cukup baik sehingga dapat mendongkrak dan membangkitkan kembali perekonomian

masyarakat di Kabupaten Aceh Besar yang sebagian telah porak-poranda akibat terjangan bencana. Dari analisis yang telah dilakukan bahwa nilai koefisien variabel (X) bernilai positif 0.000 hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan 1 rupiah akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.001 Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar, terdapat t_{hitung} sebesar $11,351 > t_{tabel}$ 2,144 dengan nilai probabilitas 0,05 (derajat signifikan) artinya pembangunan infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun yang menjadi indikator pengukuran pada penelitian ini adalah variabel (X) yaitu realisasi belanja infrastruktur jalan, jembatan dan air bersih, sedangkan variabel (Y) yaitu PDRB Kabupaten Aceh Besar atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2005-2018.

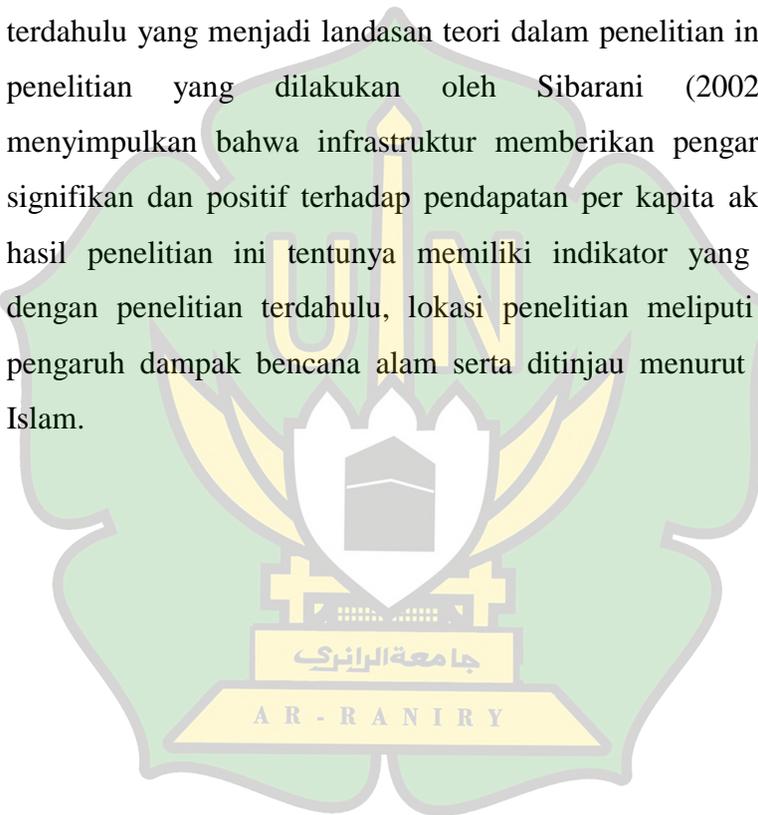
Pakar ekonomi Islam Umer Chapra berpendapat bahwa masyarakat sekulerisme lebih mengedepankan harta benda dengan tidak melihat pada aspek moral, maka pembangunan material tidak akan mencapai sebuah keadilan tanpa mendapat dukungan akhlak dan moral. Hal itu karena pembangunan yang adil memerlukan penggunaan semua sumber dengan cara yang efektif dan efisien. Sehingga kedua-duanya mustahil dapat tercapai melainkan dibarengi dengan moral dan akhlak dalam seluruh kegiatan pembangunan ekonomi. Hal itu karena, aktivitas ekonomi manusia tidak hanya ditujukan sebagai pemuasan keperluan fisik semata, akan tetapi manusia juga memiliki tanggung jawab kepada Allah

SWT. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah) tidak dapat dicapai, kecuali jika ajaran Islam dilaksanakan secara kaffah. Sehingga pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, kebaikan yang seimbang dan kekal, kebaikan yang selaras dengan kaedah-kaedah agama Islam, sehingga kekayaan tidak berhenti pada satu individu atau satu golongan saja (Chapra, 1992)

Sehingga dengan adanya sebuah kebijakan yang dilakukan pemerintah selaku pemegang amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepadanya dapat menyeimbangkan dalam mengambil kebijakan mengenai rancangan dalam pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi ini harus bisa menciptakan keseimbangan antara individu dan kepentingan masyarakat, apalagi pembangunan ekonomi ini sangat berdampak positif terhadap perekonomian suatu wilayah. Dari pembangunan ekonomi ini juga dapat dilihat, apakah perekonomian di wilayah tersebut mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya. Menurut peneliti ketika pembangunan terus mengalami kenaikan maka dapat dinyatakan wilayah tersebut mengalami kemakmuran, namun harus dilihat juga sisi ketimpangan sosialnya, jangan sampai wilayah tersebut dalam pembangunan ekonominya mengalami kenaikan namun hasil tersebut hanya terjadi di masyarakat kalangan atas saja, karena dalam islam selalu menekankan sistem keadilan dan tidak membedakan antar golongan masyarakat, namun perlu diketahui

juga dalam ekonomi Islam, yang menjadi tolak ukur dalam pembangunan ekonomi bukan hanya meningkatnya PDRB tapi yang dilihat dan yang menjadi titik tekan adalah keadilan untuk kemaslahatan serta prosesnya.

Hasil pada penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sibarani (2002) yang menyimpulkan bahwa infrastruktur memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan per kapita akan tetapi hasil penelitian ini tentunya memiliki indikator yang berbeda dengan penelitian terdahulu, lokasi penelitian meliputi wilayah pengaruh dampak bencana alam serta ditinjau menurut ekonomi Islam.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pasca Tsunami Aceh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005-2018 Ditinjau Menurut Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan teknik analisis linier sederhana, dapat dinyatakan bahwa, variabel infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini di sebabkan karena adanya peningkatan realisasi alokasi anggaran pembangunan infrastruktur pasca bencana gempa dan tsunami di Aceh. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t dengan nilai t_{hitung} sebesar 11,351 artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} 2,144 serta nilai sig. $0,000 < 0,05$ (derajat signifikan). Dari hasil tersebut berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Dalam pembangunan ekonomi, Islam menghendaki adanya kesejahteraan dan kemakmuran untuk setiap warganya tanpa melihat status sosialnya, apalagi manusia sebagai pengemban amanah di muka bumi ini sebagai pengendali untuk kemakmuran manusia dan alam sekitarnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Umer Chapra bahwa masyarakat sekulerisme lebih mengedepankan harta benda dengan tidak melihat pada aspek moral, maka pembangunan material tidak akan mencapai

sebuah keadilan tanpa mendapat dukungan akhlak dan moral, bukan hanya untuk kepentingan material akan tetapi manusia juga memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT. Pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar dalam pandangan Ekonomi Islam bisa ditinjau oleh adanya keseimbangan pembangunan di wilayah tersebut, hal itu disebabkan dengan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur serta pemulihan kembali kondisi wilayah dampak bencana yang berkesinambungan sehingga pada akhirnya dapat terus meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

5.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan mampu untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur utama yang kiranya sangat mendukung penuh segala aktivitas perekonomian warga di Kabupaten Aceh Besar
2. Pemerintah diharapkan mampu untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Besar yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan cara meningkatkan aktivitas ekonomi wilayah sehingga dapat memicu tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sasmita, Rahardjo. (2006). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Iqtishad al-Islami baina al-nazariyat wa al-tathbiq (Al-Maktab al-arabi al-hadis), h.27
- Amrullah, I.K. (2003). *Nutrisi Ayam Petelur*, Lembaga Satu Gunung Budi, Bogor.
- Atmaja, H. K. (2013). *Pengaruh Peningkatan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Sibolga*. 1-18. Vol.3 No.4 Tahun 2015.
- BPS, 2019. Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka Tahun 2018. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Bappenas, (2010). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2010*. BAPPENAS atau KPPN.
- Bappenas, (2003). *Infrastruktur Indonesia Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis*. Perum Percetakan RI, Jakarta.
- Bayong Tjasyono H.K. (2006). *Ilmu Kebumihan dan Antariksa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya - UPI.
- Benson, Charlotte & Clay, Edward (2004). *Understanding the economic and financial impacts of natural disasters*. The World Bank: Washington DC, Number 15025
- Canning, D. (1999). *Infrastruktur's Contribution to Agregate Output*. World Bank Working Paper, Number 2246.

- Chapra, Umer, M. (1992). *Islam and The economic Challenge*, United Kingdom: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang:Bandan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haris, A. (2002). *Dinamika Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: LESFI.
- Hartuti, Rine Evi. (2009). *Buku Pintar Gempa*. Yogyakarta : DIVA Press.
- Heru, Singgih Riphath (2004). *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: KOMPAS
- Himbawan, Gigih. (2010). *Penyebab tetap bermukimnya Masyarakat di Kawasan Rawan Banjir Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu, Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota*, Universitas Diponegoro, Semarang : TESIS
- Irfan Syauqi. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jhingan, M.L. (2008). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi 2. Cetakan kedelapan. Rajawali Pers. Jakarta.
- Jhingan, M.L. (2006). *Ekonomi Pembangunan dan Pertumbuhan Penduduk*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Muhamad (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mangkoesebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik*. BPFE Yogyakarta : Yogyakarta.

- Manan, A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam : Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Mukhsin, (2011). *Pertumbuhan dan Pembangunan ekonomi*, Jakarta : Rajawali Press.
- Nafilah, K. (2016). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Islamic Human Development Index Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2014*. Sulawesi Selatan : SKRIPSI.
- Rohani, Ahmad. (1997). *Media Instruksional Edukatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Santoso, S. (2010). *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sibarani. (2002). *Kontribusi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Jakarta: TESIS.
- Sugiyono. (2013). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. ALFABETA
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Kencana
- Sukirno, Sadono. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo

- Tariqi, Abdullah Abdul Husain. (2004). *Ekonomi Islam-Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Alih Bahasa: M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Tri Wahyuni, K. (2009). *Analisis pengaruh infrastruktur ekonomi dan sosial terhadap produktivitas ekonomi di Indonesia*. Bandung: SKRIPSI.
- Tunjung, H. (2011). *Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Jakarta: SKRIPSI.
- Uma, Sekaran. (2011). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4*. Jakarta: Salemba
- World Bank, (1994). *World Development Report: Infrastructure For Development*. Oxford University Press, New York. Number 3 February 2003.
- Yanuar, R. (2006). *Kaitan Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Output Serta Dampaknya Terhadap Kesenjangan di Indonesia*, Pasca Sarjana IPB, Bogor : TESIS.
- Yunan. (2009). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan: TESIS

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Awal

Tahun	Infrastruktur	Laju Pertumbuhan	PDRB	Pertumbuhan Ekonomi
2005	10.500.655.200	3,61	1.732.496	1,59
2006	12.600.550.000	3,99	1.796.097	3,67
2007	13.933.883.100	4,79	2.135.114	5,94
2008	15.945.994.450	5,31	2.258.276	5,86
2009	15.816.546.100	5,50	2.405.000	5,77
2010	17.908.765.385	6,16	2.520.172	5,65
2011	15.111.031.000	5,19	2.655.745	5,34
2012	19.129.720.200	6,58	2.736.180	4,61
2013	23.813.984.500	8,19	7.863.467	4,16
2014	25.818.945.200	8,88	8.184.458	4,08
2015	28.984.638.000	9,96	8.513.245	4,02
2016	30.740.644.217	10,57	8.854.440	4,05
2017	33.264.094.934	11,43	9.208.377	4,00
2018	28.657.674.000	9,85	9.586.678	4,08



Lampiran 2: Tabel Titik Persentase distribusi t (df =1-40)

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

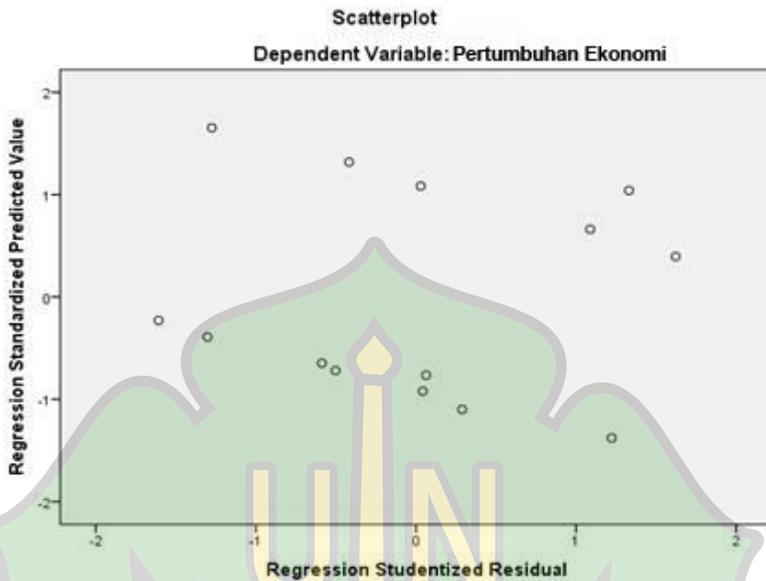
df	Pr 0.50	0.25 0.20	0.10 0.10	0.05 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	<u>2.14479</u>	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Lampiran 3: Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		14
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	972980,003794
Most Extreme Differences	Absolute	,144
	Positive	,188
	Negative	-,144
Test Statistic		,144
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

B. Uji Heteroskedastisitas



C. Uji Auto Korelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,956 ^a	,915	,908	1012709,69603	1,884
a. Predictors: (Constant), Laju Belanja Infrastruktur					
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi					

Lampiran 4: Hasil Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3821002,808	825582,855		-4,628	,001		
	Realisasi Belanja Infrastruktur	,000	,000	,956	11,351	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Lampiran 5: Uji Hipotesis

A. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3821002,808	825582,855		-4,628	,001
	Belanja Infrastruktur	,000	,000	,956	11,351	,000

a. Dependent Variable: Laju Pertumbuhan Ekonomi

B. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,956 ^a	,915	,908	1012709,69603	1,884
a. Predictors: (Constant), Laju Belanja Infrastruktur					
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi					



Lampiran : 6 SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY
 Nomor : 4088 /Un.08/FEBI/PP.00.9/11/2018
T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

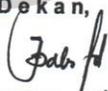
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Wahyu Mulyani Benti Saidan, M.Econ | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Cukri Ramadhan
- N I M** : 140602198
- Prodi** : Ekonomi Syariah
- J u d u l** : Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pasca Tsunami Aceh terhadap Pertumbuhan Ekonomi ditinjau menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)
- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. **N I R Y**

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 22 November 2018

D e k a n,

 Zaki Fuad

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ekonomi Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim Telp. (0651) 92141 Fax. (0651) 92579
 KOTA JANTHO - 23918

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 402 / PUPR- ABES/ 2019

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh Nomor : 2699/UIn.08/FFBT.I/TL.00/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 Perihal Mohon Kesiadain ing data dalam penulisan Skripsi, maka kami Dari Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Cukri Ramadhan
 NIM : 140602198
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Instansi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Alamat : Desa Doy Ulee Kareng Banda Aceh

2. Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Besar sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul " **Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pasca Tsunami Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Kabupaten Aceh Besar Tahun 2005 – 2018) "**.
3. Demikian Surat Keterangan Penelitian ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kota Jantho, 12 Juli 2019

امعة الرانيري

An. KEPALA DINAS PEKERJAAN
 UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN ACEH BESAR
 Sekretaris,

A R - R A N I R Y



IR. BUSRA THAMRIN, MM
 Pembina Tk. I (IV/b)

Nip 19621201 199203 1 016